

BAB IV

ANALISIS TATA BAHASA TENTANG LGBT PADA AKUN TWITTER @GERINDRA

Wacana hukum dan politik, agama, dan sosial, digunakan sesuai dengan temuan teks pada Twitter Partai Gerindra yang membahas tentang tiga hal tersebut. Maka selanjutnya ketiga wacana tersebut dijadikan sebagai acuan penelitian.

4.1 Diskusi Wacana

Berdasarkan analisis kosakata, hasil diskusi yang dapat diambil adalah bahwa meskipun Partai Gerindra mengklaim tujuan mereka yaitu untuk menyuarakan bantuannya kepada kelompok LGBT agar mereka mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tetapi mereka juga dengan tegas menolak apabila diasosiasikan dengan mendukung kelompok tersebut. Sedangkan berdasarkan analisis tata bahasa, hasil diskusi yang dapat kita ambil adalah bahwa Partai Gerindra menggunakan kalimat aktif dan kata kerja pada hampir semua tweet-nya. Hal ini berarti Partai Gerindra lebih menekankan pada subjek dan objek, daripada peristiwa itu sendiri. Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut.

Penulis mencoba menjelaskan secara lebih rinci dari instrument wacana yang disebutkan pada bab sebelumnya menggunakan wacana-wacana yang berhubungan, juga menjelaskan dari sudut pandang ruang publik virtual yang menjadi media Partai Gerindra dalam membuat diskusi ini.

4.1.1 Wacana LGBT Partai Gerindra dalam Perspektif Hukum dan Politik

Meriam Budiardjo (dalam Santoso, 2016:224) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hasil diskusi pada bab sebelumnya menunjukkan bagaimana Partai Gerindra mulai beropini menyuarakan dukungannya untuk kelompok LGBT atas ketidakadilan yang mereka dapatkan dalam hal diskriminasi pekerjaan. Partai Gerindra memulai diskusi dengan menyuarakan hal tersebut, baik dengan pihak Kejaksaan Agung maupun dengan pembaca atau masyarakat umum pengguna Twitter, menggunakan basis hukum dengan berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Kejaksaan Agung merupakan pelanggaran terhadap dasar-dasar hukum negara Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan Kejaksaan Agung merupakan perenggutan hak milik masyarakat Indonesia yang ingin bekerja dengan tenang tanpa diskriminasi dalam hal apapun, termasuk orientasi seksual dan/atau identitas gender-nya. Hal ini yang dengan lantang disuarakan oleh Partai Gerindra dengan berpegang teguh pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2 yang berisi “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Hal tersebut diperkuat dengan kosakata-kosakata yang dipilih, terutama kosakata “hak” yang terus ditekankan oleh Partai Gerindra, dengan tujuan agar kosakata tersebut dapat mengubah pandangan pembaca yang awalnya tidak mendukung jadi mendukung kelompok LGBT dalam mendapatkan haknya karena hal tersebut adalah yang sesuai tertulis di dasar hukum negara Indonesia.

Baik dalam analisis kosakata membuat klasifikasi, membatasi pandangan, maupun pertarungan wacana, Partai Gerindra tetap bersikukuh dengan kosakata “hak” untuk menunjukkan dukungannya kepada pembaca bahwa kelompok LGBT sudah selayaknya mendapatkan hak mereka. Tidak ada satupun yang boleh merenggut haknya karena itu sudah tertulis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sayangnya hal ini seakan dipatahkan dengan opininya sendiri yang menggunakan kosakata-kosakata berwacana hukum dan politik untuk menyudutkan kelompok LGBT. Beberapa di antaranya adalah dengan meminta pemerintah untuk membuatkan “aturan” untuk kelompok LGBT, “menambahkan kewajiban bagi kelompok LGBT”, hingga meminta untuk dibuatkan “payung hukum untuk menjustifikasi perbedaan kelompok LGBT”. Hal ini juga terlihat dalam analisis kosakata membuat klasifikasi, membatasi pandangan, dan marjinalisasi, yang mana termasuk dalam kategori kosakata negatif.

Sikap Partai Gerindra seakan menunjukkan adanya konflik internal dalam diri atau organisasi mereka. Konflik Internal adalah suatu perselisihan yang terjadi didalam sebuah organisasi baik itu terjadi antar anggota didalamnya ataupun antar anggota dengan pihak pengurus organisasi (Fulasifah & Pradhanawati, 2017:1). Maksudnya di sini adalah bahwa terjadinya kontradiksi pada diri Partai Gerindra dalam hal hukum dan politik menunjukkan bagaimana Partai Gerindra tidak konsisten dalam mempertahankan pendiriannya untuk mendukung kelompok LGBT mendapatkan haknya. Partai Gerindra yang pada awalnya tegas dan lantang menyuarakan hak dasar kelompok LGBT untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan menggunakan UUD 1945 sebagai pegangannya, namun

kemudian menggunakan kosakata-kosakata yang menyudutkan kelompok tersebut dengan menggunakan perspektif hukum dan politik juga yang bernada negatif. Hal tersebut menunjukkan kesan tidak tegasnya Partai Gerindra dalam menentukan tindakan atau keputusan yang seharusnya mereka ambil terkait dengan permasalahan tersebut. Di satu sisi mereka ingin membantu merebut kembali hak yang telah diambil, tapi di sisi lain mereka mengupayakan hukum yang dapat mendiskriminasi kelompok tersebut lebih dalam lagi.

Sikapnya dengan menghapus kelima tweet pertama mereka yang utama, menunjukkan kesan bahwa Partai Gerindra menggunakan tweet-tweet tersebut untuk memancing massa agar beramai-ramai berdiskusi di akun Partai Gerindra. Ketika melihat bahwa sebagian besar menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap pernyataan mereka, Partai Gerindra menghapus tweet-tweet tersebut dengan maksud untuk menghilangkan jejak ‘dukungan’. Menghapus tweet juga dapat dilihat sebagai upaya Partai Gerindra untuk mempertahankan pendukungnya agar mereka tidak berpaling karena Partai Gerindra membuat pernyataan tersebut.

4.1.2 Wacana LGBT Partai Gerindra dalam Perspektif Agama

Bukan hal yang mengejutkan apabila wacana agama masih menjadi yang teratas dari wacana apapun yang ada di Indonesia. Wacana agama – khususnya agama Islam yang menjadi agama dengan mayoritas pemeluknya di Indonesia – dan negara terus berkembang pesat sejak paska kemerdekaan sampai sekarang (Hasan, 2015:21). Begitu juga yang terjadi dalam hasil diskusi wacana agama ini. Agama menduduki kuasa tertinggi dalam wacana di Indonesia, bahkan dibandingkan dengan negara. Hal ini dapat terlihat dari dasar-dasar hukum negara Indonesia yang menggunakan agama sebagai pondasi hukumnya.

Partai Gerindra sedari awal sudah memutuskan untuk mendukung kelompok LGBT menggunakan dasar hukum negara Indonesia, tetapi banyak pembaca yang mendebat mereka menggunakan wacana agama. Meskipun Partai Gerindra dapat membalas dengan tetap teguh menggunakan wacana hukum, terkadang mereka juga membalas dengan menggunakan wacana agama, tepatnya agama Islam. Wacana agama Islam yang disampaikan Partai Gerindra cukup berpihak kepada kelompok LGBT karena mereka menyalahkan sikap diskriminasi terhadap kelompok minoritas tersebut dengan menunjukkan bahwa sikap diskriminatif bukanlah merupakan suatu ajaran agama, dan justru ditentang oleh agama. Partai Gerindra menggunakan kisah kasih sayang Nabi Muhammad untuk memberi contoh kepada orang-orang yang

memojokkan kelompok LGBT bahwa sikap diskriminatif itu terlarang oleh agama. Dengan menggunakan kosakata seperti “mengasihi dan menghormati sesama manusia”, “menghargai sesama manusia”, dan lain sebagainya, Partai Gerindra mencoba untuk membuka pandangan pembaca untuk lebih terbuka dalam menerima keberadaan kelompok LGBT.

Namun tidak jarang juga Partai Gerindra menggunakan kosakata-kosakata yang justru semakin menyudutkan dan meminggirkan kelompok LGBT, seperti “dosa”, “haram”, “laknat”, dan lainnya. Bahkan Partai Gerindra juga sempat terkesan menyamakan orang-orang dari kelompok LGBT dengan binatang anjing. Kosakata-kosakata tersebut yang secara tidak langsung menunjukkan bagaimana posisi Partai Gerindra terhadap kelompok LGBT. Maksud Partai Gerindra untuk menyampaikan wacana agama dalam topik pembahasan LGBT dengan menggunakan kosakata-kosakata negatif tersebut berpotensi untuk membuat masyarakat lainnya semakin mendiskriminasi kelompok tersebut. Maka wacana Partai Gerindra yang awalnya berfokus pada hak-hak kelompok LGBT yang ingin disuarakan untuk direbut kembali dari Kejaksaan Agung, berubah menjadi pembelaan diri atas dirinya yang tidak mendukung LGBT karena dilarang oleh agama.

Terjadinya pertentangan menggunakan wacana agama seperti yang dialami Partai Gerindra ini karena kurangnya edukasi dan informasi terhadap masyarakat bahwa orientasi seksual dan agama merupakan dua hal yang dapat berjalan berdampingan. Dinamika seksualitas dan gender di Indonesia cenderung lebih mudah diterima ketika sebelum masa penjajahan dimulai. Bahkan ketika agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, hal-hal tradisional yang memiliki nuansa LGBT, seperti Reog Ponorogo, maupun 5 (lima) macam gender di Bugis, masih bertahan jauh hingga sesudah Islam datang, menunjukkan bahwa diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok LGBT adalah hal modern dalam sejarah Islam di Indonesia.

Seorang akademisi Muslim, Lailatul Fitriyah¹ mengatakan bahwa tidak ada pembahasan sistematis mengenai isu LGBT apabila dilihat dari sisi teologi Islam. Laily mengungkapkan bahwa “ajaran Islam” dalam artian fiqh (yurisprudensi Islam) hanya membahas tindakan, bukan orientasi seksual. Maka dari itu fiqh membuka banyak ruang terhadap eksistensi LGBT. Artinya adalah bahwa yang dilarang dalam fiqh tersebut adalah praktik “liwat” (hubungan seksual anal atau sodomi), bukan perasaan atau ekspresi homoseksualitasnya. Hal ini semakin dikuatkan

¹ Ayunda Nurvitasari, *Al-Qur'an Tak Ajarkan Membenci Kelompok LGBT: Akademisi Muslim*, diakses dari <https://magdalene.co/story/alquran-tak-ajarkan-membenci-kelompok-lgbt-akademisi-muslim>, pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 17.59 WIB.

dengan hipotesis Anshori² mengenai jejak *queer* dalam Al-Quran dan Hadis adalah bahwa sebagaimana dengan lawan jenis, seksualitas sesama jenis merupakan hal yang natural. Tetapi kemarahan Allah timbul ketika ekspresi seksual seseorang merupakan paksaan – pemerkosaan – terhadap anak di bawah umur, seperti yang dilakukan kaum Nabi Luth.

Belum lagi mengenai Ludovic-Mohamed Zahed, seorang imam di Paris yang mengakui dirinya adalah seorang *gay* secara terbuka³. Ia merupakan muslim yang taat dan merupakan pendiri *Homosexual Muslims of France*. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan orientasi seksual adalah dua hal berbeda yang dapat berjalan beriringan tetapi tidak saling bertentangan, karena agama Islam mengajarkan rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia.

4.1.3 Wacana LGBT Partai Gerindra dalam Perspektif Bermasyarakat

Secara bahasa, mendukung berarti ‘menyokong; membantu; menunjang’ (KBBI Daring, 2018). Dengan kata lain, Partai Gerindra memaknai kosakata ‘mendukung’ sebagai ‘membantu kelompok LGBT agar eksistensinya diakui di Indonesia’. Partai Gerindra secara terus menerus menegaskan bahwa mereka tidak mendukung kelompok LGBT perihal perilakunya, tetapi hanya membantu mereka memperoleh hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak karena mereka merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya.

Meskipun sejak awal Partai Gerindra telah menggunakan hukum dan hak sebagai dasar untuk membela kelompok LGBT dan menganggap mereka sebagai bagian dari warga negara Indonesia, tetapi penggunaan kosakata seperti “dilarang mengekspos dan mengembangkan perilaku”, “berdampak buruk bagi kesehatan”, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa sesungguhnya Partai Gerindra menganggap buruk keberadaan kelompok LGBT di Indonesia. Walaupun Partai Gerindra sempat mengedukasi masyarakat menggunakan PPDGJ bahwa LGBT bukan merupakan gangguan jiwa, rupanya dalam teks-teks lainnya menunjukkan bahwa Partai Gerindra secara tidak langsung menyebut kelompok LGBT “tidak normal”, memerlukan “penyuluhan” dan “pencegahan”. Hal ini terlihat di analisis kosakata membuat klasifikasi, membatasi pandangan, pertarungan wacana, bahkan marjinalisasi.

² Aan Anshori, *Jejak ‘Queer’ dalam Al-Qur’an dan Hadis*, diakses dari <https://magdalene.co/story/jejak-queer-dalam-alquran-dan-hadis>, pada 19 Juli 2021, pukul 18.00 WIB.

³ DW, *Kisah Seorang Imam Gay di Paris*, diakses dari <https://www.dw.com/id/kisah-seorang-imam-gay-di-paris/g-39857127>, pada tanggal 19 Juli 2021, pukul 18.01 WIB.

Dalam efek kalimat pasif penghilangan pelaku, penggunaan kalimat pasif cukup banyak dilakukan oleh Partai Gerindra. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berfokus pada sasaran dari aktor, dalam hal ini kelompok LGBT. Penghilangan pelaku pun tidak banyak dilakukan oleh Partai Gerindra. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Gerindra ingin terus menerus mengulang “LGBT” sebagai sasaran atau objek karena memang objek tersebut yang sedang dibicarakan oleh Partai Gerindra. Mereka ingin pembaca terus terfokus pada objek pembahasan mereka agar tidak meluas ke pembahasan lainnya.

Sedangkan pada efek nominalisasi penghilangan pelaku, menunjukkan bahwa Partai Gerindra tidak terlalu fokus kepada peristiwa karena hanya ada satu teks yang menggunakan kalimat nomina. Tetapi peristiwa dari teks tersebut adalah bahwa Partai Gerindra ingin masyarakat mengerti bahwa LGBT bertentangan dengan berbagai norma dan memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Kosakata-kosakata dan tata bahasa tersebut semakin menunjukkan posisi Partai Gerindra terhadap kelompok LGBT, yaitu bahwa Partai Gerindra memberikan kesan bahwa mereka mengajak masyarakat untuk terus berpikiran negatif terhadap kelompok LGBT.

4.2 Diskusi *Virtual Public Sphere*

Twitter sebagai ruang publik virtual atau *virtual public sphere* dimanfaatkan Partai Gerindra sebagai pejabat publik untuk membuka diskusi dengan topik pembahasan hak LGBT yang telah diambil oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendapat Marshall McLuhan yang memprediksi hadirnya media sosial yang dapat memfasilitasi kita untuk mengetahui segala macam informasi atau fenomena yang sedang terjadi di dunia. Menurut Habermas *public sphere* merupakan elemen yang sangat penting untuk masyarakat demokrasi, maka tindakan Partai Gerindra dengan membawa diskusi di Twitter adalah tindakan yang sudah benar dilakukan.

Partai Gerindra membuka diskusi di ruang publik virtual dengan tema LGBT merupakan langkah kontroversial dalam kehidupan politik di Indonesia. Dengan membawanya ke Twitter, Partai Gerindra berniat untuk melihat dengan mudah reaksi masyarakat apabila disuguhi tema tersebut.

Hasil diskusi wacana, baik hukum dan politik, agama, dan sosial yang tetap menunjukkan ketidakberpihakannya kepada kelompok LGBT tampak berbahaya apabila dilihat menggunakan konsepsi Habermas tentang ruang publik yang ‘ideal’. Karena menurutnya ruang publik yang

ideal adalah ketika masyarakat terlibat dapat memiliki pengaruh langsung pada cara kerja lembaga legislatif. Apabila dilihat dari hasil wacana di atas, wacana ideologi mayoritas tetap menang, yaitu ideologi masyarakat yang tidak mendukung kelompok LGBT. Dengan konsepsi Habermas, hal ini dapat berbahaya bagi kelompok LGBT karena wacana mayoritas tersebut bisa saja berpengaruh pada lembaga legislatif dan menghasilkan regulasi-regulasi yang semakin merugikan kelompok LGBT.

Selain itu, karena ruang publik adalah sebuah ruang yang aktif mengontrol dan membentuk kesadaran masyarakat (Kusno dalam Dewilarasati, 2015:15), dikhawatirkan bahwa diskusi Partai Gerindra yang berakhir dengan konfirmasi mereka yang menegaskan bahwa mereka tidak mendukung kelompok LGBT, akan membentuk masyarakat yang juga tidak mendukung dan semakin meminggirkan kelompok tersebut. Pada akhirnya konsep ruang publik yang ideal bagi Habermas menjadi tidak ideal bagi kelompok LGBT karena keberpihakannya kepada wacana mayoritas, di mana di Indonesia ini wacana mayoritas adalah wacana yang menolak LGBT. Di sini terlihat bahwa pembahasan mengenai isu minoritas di ruang publik virtual akan tetap 'dikalahkan' oleh ideologi mayoritas.